
Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia

Implementation Of Policy Regarding Free Education In Indonesia

Andreas Kurniawan Matondang*, Armisella Br. Sembiring, Indri Erfi Yanti, Rahma Azhani Zulmi

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia,

Diterima: 28 November 2021; Direview: 04 Februari 2023; Disetujui: 20 April 2024

*Corresponding Email: andreamatondang590@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. Realita nya sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak mampu mengemban dan melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah sedangkan biaya untuk melanjutkan pendidikan sangat tinggi. Salah satunya hal ini banyak terjadi di negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research), kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian penerapan pendidikan gratis tersebut sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, Ml Darul Ibad, Sumatera Selatan, Kota Batu dan lain-lain. Kebijakan ini memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu peningkatan angkat partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah dikarenakan seluruh peserta didik dibebaskan dari biaya pendidikan.

Kata Kunci: Ekonomi, pendidikan, dan gratis

Abstract

The purpose of this article or writing for this research is to find out the implementation of free education policies in Indonesia. The reality now is that many children are unable to carry out and continue their education. This is due to low economic factors while the cost of continuing education is very high. One of these things is happening in Indonesia. The method used in this research is library research. This research activity is centered on the study of data and books related to the theme. The results of this study indicate that the Government is obliged to ensure the availability of efficient implementation of free education for every citizen aged seven to fifteen years which is known as nine-year compulsory education. Thus the application of free education has been implemented in several areas such as the implementation of free education policies in North Kayong Regency, Ml Darul Ibad, South Sumatra, Batu City and others. This policy provides benefits for improving the quality of education in Indonesia, namely increasing school participation rates and decreasing dropout rates because all students are exempt from tuition fees.

Keywords: economy, education, and free

How to Cite: Andreas Kurniawan Matondang, Armisella Br. Sembiring, Indri Erfi Yanti, Rahma Azhani Zulmi. (2024). Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia. *Journal of law, Human Right & Citizenship*. 2 (2): 178-184,



PENDAHULUAN

Indonesia akan menghadapi perkara yang cukup berat terpaut kependudukan yang paling utama rendahnya tingkatan pembelajaran warga di umur produktif. Perihal ini terjaln apabila penduduk umur produktif yang lumayan besar ini tidak mempunyai kompetensi yang mencukupi buat produktif. Oleh sebab itu, kebijakan dalam RPJMN 2014-2019 merupakan memaksimalkan bonus demografi. Bonus demografi ini wajib dipersiapkan lewat investasi di bidang kesehatan, pembelajaran, tenaga kerja, kependudukan, keluarga berencana, serta ekonomi. Bonus demografi itu, dapat menaikkan perkembangan ekonomi 10- 15 persen (Pelaksanaan, 2019)

Indonesia akan mengalami bonus demografi diperkirakan tahun 2030-2040. Akan terjadi peristiwa dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Sehingga ini akan menjadi tantangan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi yang terkait dengtan ketenagakerjaan dan pendidikan. Dunia pembelajaran jadi kunci utama buat bonus demografi. Buat menciptakan sumber energi manusia yang bermutu serta terampil butuh terdapatnya kerja sama segala susunan warga serta lembaga terpaut. Buat menghasilkan generasi muda yang produktif serta mempunyai keahlian spesial hingga butuh terdapatnya pembelajaran serta pelatihan secara kontinyu pada lembaga- lembaga ataupun institusi-institusi pembelajaran. Termasuk memberikan pemerataan pendidikan agar semua anak di Indonesia terpenuhi haknya akan pendidikan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan. Lembaga- lembaga pembelajaran serta akademi besar butuh mempersiapkan lulusan yang sanggup bersaing di dunia industri. Dengan lulusan yang bermutu serta sanggup menghasilkan lapangan pekerjaan sendiri dikira sanggup hadapi fenomena bonus demografi (Faddilah, 2020)

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi bermutu dan berkualitas demi kepentingan masa depan bangsa. Bagi setiap orang tua, warga & bangsa, pemenuhan akan pendidikan sebagai kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan bagian primer pada upaya pembentukan asal daya insan (SDM) yg dibutuhkan suatu bangsa. Memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya yang murah dan pendidikan yang layak merupakan salah satu kewajiban negara kepada masyarakatnya dan sudah tercantum dalam UUD 1945 sebagai dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Rahman & Nasihin, 2020) Pada dasarnya pendidikan misalnya eksperimen yang pernah terselesaikan hingga kehidupan insan ini berakhir. Dikatakan demikian, lantaran pendidikan adalah bagian berdasarkan peradaban insan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan menggunakan potensi alami insan yang selalu ingin menghadirkan inovasi-inovasi terkini yang kreatif & inovatif pada segala bidang kehidupan.

Pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk bidang pendidikan, namun kenyataannya masih ada saja anak yang putus sekolah dikarenakan permasalahan ekonomi. Hal ini juga dikarenakan minimnya sosialisasi dilingkungan masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemerintah memberikan anggaran khusus untuk memberikan pembebasan biaya untuk Sekolah Dasar dan memberikan bantuan biaya operasional untuk pendidikan menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan kondisi ini dan lebih mengawasi anggaran-anggaran yang diberikan dalam keberlangsungan pendidikan.

Salah satu program pemerintah bagi sekolah negeri adalah pendidikan tanpa pungutan atau pendidikan gratis yang memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat tanpa membebani biaya pendidikan. Namun pada kenyataannya masih ada saja sekolah yang melakukan pungutan kepada siswanya dengan alasan-alasan tertentu (Maslani S.Pd, 2018). Sehingga dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan gratis di Indonesia dana pa saja faktor-faktor penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu nantinya dapat diketahui bagaimana berlangsungnya pendidikan gratis bagi masyarakat dan apasaja yang melatarbelakangi ketidakberhasilan implementasi pendidikan gratis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif deksriptif. Menurut Wekke (2019) pendekatan kualitatif adalah pendekatan tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder yaitu data yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel jurnal, artikel web, dan sebagainya. Berdasarkan dari temuan-temuan data yang diperoleh penulis akan di deskripsikan melalui rangkaian kata dan kalimat.

Pada penelitian kualitatif bentuk data yang digunakan berupa kalimat dan narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan melalui pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis, artikel jurnal, hasil penelitian serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu berupa teori, data dan informasi yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan media cetak (Wekke, 2019). Analisis data kualitatif adalah teknik pengolahan data kualitatif berupa kata-kata yang dilakukan dalam rangka mendeksripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritis. Dalam menganalisis data dilakukan dengan tahapan, reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti akan mereduksi data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui jurnal, buku, hasil penelitian ataupun referensi lain. Selanjutnya, data yang terkumpul akan disajikan dengan cara dekripsi dan naratif hasil dari data yang didapatkan yang kemungkinan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah tahap kesimpulan, dimana peneliti akan menuangkan kesimpulan dari data-data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan guna mengembangkan pengetahuan.(Rin, n.d.) Kata "pendidikan" berakar pada bahasa proto-India-Eropa, dalam kata deuk. Kata itu datang ke dalam bahasa Latin dalam dua bentuk: educare, yang berarti "untuk memelihara" atau "untuk meningkatkan," dan educatus, yang diterjemahkan sebagai pendidikan. Dalam bahasa Inggris Pertengahan itu didik, sebelum berubah menjadi bentuk yang sekarang. Pendidikan mencakup pengajaran dan pembelajaran keterampilan khusus, dan juga sesuatu yang kurang nyata tetapi lebih mendalam: pemberian pengetahuan, penilaian positif, dan kebijaksanaan yang dikembangkan dengan baik. Pendidikan sebagai salah satu aspek fundamentalnya menanamkan budaya dari generasi ke generasi, namun lebih mengacu pada proses formal belajar-mengajar yang terdapat di lingkungan sekolah. Pendidikan berarti "menarik keluar", memfasilitasi realisasi potensi diri dan bakat terpendam seorang individu. Dengan demikian setiap individu wajib menerima sebuah pendidikan dari sekolah guna membangun dan mengembangkan pola pikir dan juga kemajuan dalam hidupnya.

Namun realita nya sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak mampu mengemban dan melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah sedangkan biaya untuk melanjutkan pendidikan sangat tinggi. Salah satunya hal ini banyak terjadi di negara Indonesia. Dan hal ini menyebabkan pendidikan dalam masyarakat sangat rendah. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat sebuah undang-undang no 22 tahun 2003, tentang sistem pendidikan pasal 5 ayat 1 menyebutkan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dan dibantu dengan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menagani kasus tersebut. Kebjiakan ini sering kita dengar dengan istilah kebijakan public.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut pendapat dari para ahli salah satunya Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. (ABDAL, 2015). Dan Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Sehingga dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan kebijakan public merupakan sebuah upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan public merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan dengan hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Dasar dari kebijakan pemerintah adalah dengan menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek yang merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan public atau masyarakat (Mustari, 2015). Solichin Abdul Wahab dalam Taufiqurohman (Taufiqurakhman, 2014) menyebutkan pedoman tentang kebijakan antara lain: 1) Kebijakan berbeda dengan keputusan; 2) Kebijakan tidak serta merta dibedakan dengan administrasi; 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan; 4) Kebijakan terdiri dari tiada tindakan dan tindakan; 5) Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai; 6) Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran; 7) Kebijakan muncul dari proses yang berlangsung; 8) Kebijakan yang terdiri dari hubungan antar organisasi dan intra organisasi.

Menurut Easton kebijakan public diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai yang dilakukan secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan memberikan pengertian terkait kebijakan public sebagai suatu program pencapaian tujuan, pencapaian nilai yang dilakukan dalam praktik secara terarah (Taufiqurakhman, 2014). Untuk membuat kebijakan public terdapat siklus yang akan dijalani. Dalam Nuryanti Mustari (2015) siklus kebijakan public terdiri dari, 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) evaluasi kebijakan.

Pertama, penyusunan agenda, para pejabat akan menempatkan masalah pada agenda public yang akan berlangsung, yang terlebih dahulu masalah-masalah public yang diterima akan dipilah-pilah terlebih dahulu mana permasalahan yang termasuk ke dalam masalah public dan harus segera diselesaikan. Pada tahap penyusunan agenda, terdapat masalah yang tidak sama sekali akan menjadi pembahasan dalam agenda, terdapat masalah yang ditetapkan akan menjadi fokus pembahasan dalam agenda, ataupun terdapat masalah dikarenakan alasan tertentu terus mengalami penundaan untuk waktu yang lama (Mustari, 2015).

Kedua, tahap formulasi kebijakan dimana permasalahan yang masuk ke dalam agenda yang kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan dan didefinisikan yang kemudian dicari penyelesaian terbaik dari masalah tersebut.

Ketiga, tahap selanjutnya adalah adopsi kebijakan yang mana dipilih kebijakan yang terbaik dari banyaknya alternative kebijakan yang ditawarkan pembuat kebijakan, untuk kemudian kebijakan tersebut diadopsi dan didukung oleh mayoritas legislative untuk dilegitimasi.

Keempat, yaitu tahap implementasi kebijakan dimana alternative yang telah dipilih yang mana menjadi keputusan program kebijakan sebagai dari pemecahan masalah yang telah disepakati oleh pembuat kebijakan dan dilegitimasi harus diimplementasikan.

Pengimplementasian program kebijakan dilakukan dan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi ataupun agen pemerintah tingkat bawah.

Kelima, yang merupakan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan, tahapan ini kebijakan yang telah diimplementasikan dan dijalankan ke masyarakat atau badan-badan pemerintahan akan dinilai sejauh mana program kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang ada. Dalam suatu kebijakan dasarnya harus memiliki perubahan atau dampak yang terjadi. Untuk itu kebijakan tersebut dievaluasi untuk dinilai apakah sudah ada dampak yang diinginkan.

Kebijakan Publik Mengenai Program Pendidikan Gratis

Pendidikan secara sederhana diartikan sebagai usaha dari manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan kebudayaan yang ada. Menurut Abdul Hamid (2015) adalah usaha sadar dan terencana dari manusia untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran kepada anak-anak agar secara aktif mampu mengembangkan potensi diri untuk cakap dalam melaksanakan tugas di kehidupannya sendiri. Untuk itu, pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia.

Salah satunya kebijakan public tersebut merupakan tentang “Pendidikan Gratis” Kebijakan program pendidikan gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS), adalah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah merupakan kebijakan publik desentralisasi (UU 32 Tahun 2004) di mana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, sesuai kebijakan pendidikan nasional (UU No. 20 tahun 2003). Sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional ada dua hal kusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 (4), kedua UU No. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga negara. (Andriani, 1945). Pemerintah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Dengan demikian penerapan pendidikan gratis tersebut sudah diterapkan di beberapa daerah contohnya :

- a. Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu peningkatan angkat partisipasai sekolah dan penurunan angka putus sekolah dikarenakan seluruh peserta didik dibebaskan dari biaya pendidikan. Sekolah yang menadapatkan kebijakn gratis dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada jalur pendidikan formal. Dengan jumlah alokasi anggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Kayong Utara menerapkan pendidikan gratis di wilayahnya untuk peserta didik baik sekolah negeri maupun swasta dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembiayaan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara diambil dari pos RAPBD yang dikhususkan untuk semua sekolah. (Jumadi , Dedi Kusnadi, 2014)
- b. Pendidikan gratis di MI Darul Ibad sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan pemenuhan yang menjadi indikator kebijakan pendidikan gratis terdiri dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik

Badan-Badan Pelaksana, Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik. (Ida Mustikawati, 2019)

- c. Sumatera Selatan juga termasuk salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan Sekolah Gratis di Sumatera Selatan ditetapkan sejak tahun 2009 dengan sasaran program yaitu sekolah dari SD-SMA/SMK/Sederajat kecuali kelompok belajar paket. Kemudian di tahun 2014, pemerintah provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program Kuliah Gratis dengan alokasi 2000 peserta setiap tahunnya dan di tahun 2018 telah mencapai 8000 peserta program (Widyasthika, 2019)
- d. Program Sekolah Gratis menunjukkan indikasi adanya pengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di Sumatera Selatan meski masih menyisakan pekerjaan yang belum tuntas. Hal ini ditunjukkan dari Angka Partisipasi Sekolah mulai dari SD/Sederajat sampai SMA/SMK sederajat mulai beranjak naik dari tahun 2006 sampai 2017.
- e. Program pendidikan gratis juga diberlakukan di Kota Batu yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kebijakan pendidikan gratis terdapat di Kota Batu melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: "Maksud diberikannya BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah" dan pasal 4 menyatakan bahwa: "BOSDA diberikan kepada PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi TK/RA/BA/ABA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, serta SLB". Implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Kota Batu diberikan kepada siswa dengan jaminan gratis biaya masuk, SPP, kegiatan ekstrakurikuler dan buku paket pelajaran yang tersedia di perpustakaan. Sedangkan untuk seragam dan kebutuhan pendidikan yang lain tetap ditanggungoleh orangtuasiswa (Putri, 2019).

SIMPULAN

Pendidikan adalah aspek yang penting dalam membina kemampuan anak dan menjadi bekal anak di masa depannya. Kebijakan terkait pendidikan merupakan dari kebijakan publik. Sebagai dari kebijakan publik dan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan pendidikan yang murah dan layak, pemerintah telah membuat program kebijakan pendidikan gratis dari tingkat TK (taman kanak-kanak) sampai dengan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Program kebijakan pendidikan gratis sudah berjalan dengan baik selama ini walaupun masih terdapat kendala-kendala atau masalah-masalah dari internal sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Akhir dari tulisan ilmiah ini, pertama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena tanpa ijinnya belum dapat menyelesaikannya. Lalu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Prayetno, S.IP., M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti. Serta penulis ucapan terima kasih kepada orang tua penulis yang senantiasa mendorong penulis untuk tidak menyerah.

DAFTAR PUSTAKA

ABDAL, M. S. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konssep Kebijakan Publik). In *Daras*

Andriani, N. (1945). Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. *Kebijakan Publik*, 5(3), 23-30.

Faddilah, U. (2020). *Bonus Demografi dan Peran Dunia Pendidikan*.

Hamid, A. (2015). Implementasi Kebijakan, Pendidikan Gratis. *E-Journal Ilmu Pemerinntahan*,



<https://journal.mahesacenter.org/index.php/jolas>



mahesainstitut@gmail.com

183



3(2), 623–635.

Ida Mustikawati, M. J. (2019). *Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ibad Ajung Jember*. 19(1), 70–85.

Jumadi, Dedi Kusnadi, M. S. (2014). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Tesis*, 1–21.

Maslani S.Pd. (2018). *Pendidikan Gratis Yang(Masih) Problematis*. Kompasiana.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik*. 307.

Pelaksanaan, D. R. (2019). *Strategi pendanaan pendidikan menengah*.

Putri, N. D. (2019). *Implementasi Program Pendidikan Gratis DI SMK Negeri 1 Batu*. Universitas Negeri Malang.

Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863>

Rin, Y. S. (n.d.). *Pendidikan : Hakikat, Tujuan Dan Peroses*.

Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Penerbit Gawe Buku.

Widyasthika, H. F. (2019). *Sekolah Gratis Untuk Semua : Meninjau Implementasi Program Pendidikan di Sumatera Selatan*. Indonesia Development Forum 2019. <https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/knowledge-center/detail/13403-13403-sekolah-gratis-untuk-semua-meninjau-implementasi-program-pendidikan-di-sumatera-selatan>